

Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Melalui Inovasi CSR Pada PT Djarum Foundation Untuk Mencetak Tenaga Terampil

Alfiatsa Rizqi Ferkasa, Puji Astuti
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro Jl. Prof H Soedarto,S.H Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)
7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

In an effort to accelerate the improvement of workforce competence, the government continues to encourage the industrial world to participate in assisting education and vocational training in vocational schools and Job Training Centers. Can contribute and give more skills for the students of the Vocational School assisted by the Djarum Foundation into the world of work or industry later in an effort to produce skilled workers. In the form of a partnership between the Djarum Foundation and the Kudus Regency Youth and Sports Education Office, an agreement was reached for assistance from the Djarum Foundation in the form of CSR (Corporate Social Responsibility) activities. The form of CSR assistance carried out by the Djarum Foundation to a number of SMKs that have been designated by the Djarum Foundation as recipients of CSR assistance, is in the form of facilities and infrastructure assistance which are usually in the form of supporting tools for teaching and learning activities or in the form of buildings or learning rooms.

Keywords: Partnership Pattern, Vocational, Djarum Foundation

ABSTRAK

Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah terus mendorong dunia industri agar ikut membantu pendidikan maupun pelatihan vokasi di sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja. Dapat memberi kontribusi dan ketrampilan lebih bagi para siswa-siswi Sekolah Vokasi Binaan Djarum Foundation ke dalam dunia kerja atau industri nantinya dalam upaya mencetak tenaga kerja terampil. Dalam bentuk kemitraan antara Djarum Foundation dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, terjalin kesepakatan untuk adanya bantuan dari Djarum Foundation berupa kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adapun bentuk bantuan CSR yang dilakukan oleh Djarum Foundation terhadap sejumlah SMK yang sudah ditetapkan Djarum Foundation sebagai penerima bantuan CSR, ialah berupa bantuan sarana dan prasarana yang biasanya berbentuk alat-alat pendukung kegiatan belajar mengajar atau berbentuk gedung-gedung maupun ruangan pembelajaran.

Kata Kunci: Pola Kemitraan, Vokasi, Djarum Foundation

A. Pendahuluan

Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja terampil, pemerintah terus mendorong dunia industri agar ikut membantu pendidikan maupun pelatihan vokasi di sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja. Karena, menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, hal itu penting untuk menjaga relevansi antara kurikulum vokasi dengan dunia industri. Jadi, kompetensi peserta vokasi langsung nyambung dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri itu, kata Menaker Hanif saat mengunjungi beberapa Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat pembinaan dari Djarum Foundation di Kudus kata Hanif, jika dunia industri sebagai pihak yang membutuhkan lulusan Pelatihan atau Pendidikan Vokasi ikut menentukan Kurikulum, mengirim instruktur dan sarana prasarana, bisa dipastikan hasilnya akan sesuai dengan pasar kerja. Begitu pula, jika kerja sama pemerintah dengan industri dalam hal pelatihan dan Pendidikan Vokasi

berjalan dengan baik, tak ada lagi cerita ada lulusan SMK yang menganggur seperti yang dialami sebagian alumninya selama ini. Inilah hal positif jika industri dan Swasta terlibat, Pemerintah terus mendorong keterlibatan mereka, ucapnya. Hanif menuturkan pemerintah saat ini tengah menggenjot peningkatan sumber daya manusia (SDM) pekerja melalui vokasi. Menurutnya, untuk Pendidikan Vokasi itu ditangani Kemendikbud, sedangkan Kemnaker menangani Pelatihan Vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Praktik baik yang telah ditunjukkan oleh SMK binaan Djarum Foundation ini akan diadopsi pada BLK yang dikelola oleh Kemnaker. Kegiatan CSR semakin marak diselenggarakan oleh perusahaan di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Setelah penetapan UU PT (Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan CSR yang pada awalnya merupakan hal yang bersifat sukarela saat ini berubah menjadi suatu hal yang wajib dilakukan.

Dengan alasan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sudah seharusnya perusahaan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Djarum Foundation dibentuk oleh salah satu perusahaan di Indonesia yang telah melakukan kegiatan Corporate Sosial Responsibility sejak jauh sebelum Djarum Foundation berdiri dan sebelum Undang-Undang ditetapkan. Sejak pertama kali berdiri pada 21 April 1951 pemilik dari Djarum Foundation sudah mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan kepedulian untuk melakukan aktivitas CSR pada sebuah sekolah dasar, lalu diikuti dengan kegiatan sosial lain seperti penghijauan Kota Kudus pada 1979. Bidang pendidikan telah menjadi prioritas dan tuntutan bagi masyarakat pada saat ini. Djarum Foundation dan masyarakat sama-sama percaya bahwa dengan adanya pendidikan yang baik maka kesejahteraan masyarakat pun akan lebih baik. Djarum Foundation terus mengupayakan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada melalui salah satu pilarnya

Bakti Pendidikan. Secara berkesinambungan, Djarum Foundation turut serta dalam mengembangkan pendidikan melalui program-program CSR bakti pendidikan. Salah satu kegiatan CSR bakti pendidikan adalah peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan di Kudus. Sekolah Menengah Kejuruan ke depannya akan disingkat SMK.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan CSR di PT. Djarum melalui Djarum Foundation?
2. Bagaimana Inovasi yang dilakukan Djarum Foundation dalam Mengimplementasikan CSR?
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam program CSR tersebut?

B. Kajian Teori

1. Teori Inovasi

Inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan baik sumberdaya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada

(Drucker, 1985). Menurut Adair (1996), inovasi adalah proses menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Sedangkan menurut Raka (2001), inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat (sosial/ekonomi).

Luecke (2003) menjelaskan inovasi sebagai pengenalan atas sesuatu atau metode kerja yang baru dan ada usaha untuk memperbarui metode yang lama. Menurut Suryana (2006), inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (doing new thing). Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah proses menemukan dan menambah atau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada guna untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang.

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering

dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

2. Teori Kurikulum

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya yang berkenaan dengan penyiapan tenaga kependidikan yang berkualitas maka yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah kurikulum yang dirancang dengan baik sehingga akan memberikan kelancaran dalam perputaran roda pendidikan yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya kurikulum dibuat oleh guru di setiap satuan pendidikan untuk menggerakkan mesin utama pendidikan, yakni pembelajaran. Dengan demikian setiap kurikulum dalam sebuah satuan pendidikan dapat disesuaikan

dengan kondisi setiap daerah bersangkutan, serta memungkinkan untuk memperbesar porsi muatan lokal, seperti yang termuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Kurikulum yang disusun dengan baik harus didasari dengan teori kurikulum yang dikuasai dan dipelajari semua hal yang terkait dengannya sehingga terencana sebuah rancangan kurikulum yang dapat diterapkan dengan baik sesuai rancangannya dan memperoleh hasil yang memuaskan.

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar.

Harold B, Albery yang dikutip oleh Nasution "All of the activities that are provided for the student by the school" Kurikulum adalah kegiatan yang disajikan oleh sekolah bagi para pelajar. Tidak ada pembatasan antara kegiatan didalam kelas dan diluar kelas.

Menurut Saylor yang dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata "A curriculum is total effort of the school to going about desired out comes in school and out-of-school situation." Kurikulum adalah usaha maksimal dari sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan didalam sekolah dan diluar situasi sekolah.

3. Teori Tenaga kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.

Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja

tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (work-ing age population) (Sumarsono, 2009). Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pada UU No. 25 tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih, sedangkan pada undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2003 tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun pada undang-undang tersebut melarang mempekerjakan anak – anak. Anak-anak menurut UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985).

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkata kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain – lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu – waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potensial labor force (Simanjuntak, 1985).

Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Di antara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed persons. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja atau labor force (Simanjuntak, 1985).

Tenaga kerja.

4. Teori Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara. CSR dapat didefinisikan sebagai Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata discretionary juga memberikan nuansa

bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Dari berbagai macam definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Konsep Dasar Corporate Social Responsibility

Elkington seorang ahli komunikasi memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan

yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya.

5. Teori Public Private Partnership

Konsep PPP pertama kali muncul pada Juni 1998 di British Columbia. Konsep PPP merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas dan infrastruktur. (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik (America's National Council on Public Private Partnership, 2000).

Paskarina (2007) mengemukakan bahwa pada prinsipnya, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas pelayanan (inefisien dan inefektif) dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Pada hakekatnya, pelibatan sektor swasta dalam

pengembangan sarana-prasarana akan memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi managerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Karakteristik dari PPP adalah kemitraan yang didalamnya terdapat sharing antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab dan reward. Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara poyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi public dan private sector saja.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif yaitu metode untuk meneliti pada kondisi yang sebenarnya dan yang menjadi instrument kunci adalah peneliti itu sendiri, melalui jenis penelitian ini peneliti berusaha untuk

mendapatkan data-data maupun informasi yang berkaitan dengan Inovasi Djarum Foundation melalui bakti pendidikan dan pemerintahan yaitu Kementrian Tenaga Kerja (SMK Rus kudus) dalam mencetak angkatan kerja yang terampil.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan program Bakti pendidikan tersebut, Djarum foundation memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan CSR seperti yang dikemukakan oleh David Crowther, yaitu:

1. Sustainability (Keberlanjutan)

Djarum Foundation melaksanakan program Bakti Pendidikan atau Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Memajukan negara indonesia yang harus di benahi yaitu bukan hanya dari salah satu Sektor saja tetepi di semua Sektor salah satunya yaitu Sektor Pendidikan. Dalam program tersebut, Djarum Foundation memberikan bantuan berupa Beasiswa untuk Siswa-Siswi di seluruh Sekolah Vokasi binaan Djarum Foundation maupun Perguruan Tinggi yang berada di sekitar Kabupaten Kudus maupun seluruh Kota-Kota di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan karena di kawasan Kabupaten

Kudus dan Kota-Kota seluruh Indonesia terdapat banyak Siswa-siswi yang dapat diharapkan dapan meningkatkan Kualitas SDM. Sekolah Vokasi binaan Djarum Foundation Djarum Foundation melihat ini adalah ujung tombak dari sebuah kesuksesan negara dari kesuksesan kemajuan sebuah negara, maka kita bersama-sama mau untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama program-program yang telah dibuat di Kudus maupun di Kota lain yang ada di Indonesia.

Bagaimana srategi Djarum Foundation dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility(CSR) oleh saudari (Galuh Paskamagma)

“Jadi yg pertama yaitu harus memastikan bahwa kualitas dari sekolah binaan atau kualitas dari mahasiswa penerima beasiswa memiliki kualitas ketrampilan yang sesuai standart industri. Fokus Djarum Foundation di sekolah vokasi yaitu memastikan bahwa kurikulum yang di ajarkan di sekolah vokasi sama dengan apa yang di dibutuhkan oleh industri”. (Galuh Paskamagma., wawancara 25 Januari 2022)

2. Accountability (Pertanggungjawaban)

PT Djarum adalah salah satu perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Dengan adanya kegiatan usaha yang

dilakukan oleh PT Djarum tersebut, tentu menimbulkan dampak bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Dampak tersebut terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. sebagai bentuk pertanggungjawaban PT Djarum kepada lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan, PT Djarum mendirikan Djarum Foundation untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya. Bahkan PT Djarum telah melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosialnya sejak tahun 1987 jauh sebelum pemerintah mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial. Kegiatan tanggung jawab sosial tersebut bertujuan untuk membantu masalah-masalah di sekitar lokasi perusahaan ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Djarum Foundation membagi kegiatan CSRnya melalui lima bidang yaitu Bakti Pendidikan, Bakti Olahraga, Bakti Lingkungan, Bakti Sosial, dan Bakti Budaya. Semua bidang tersebut sasaran utamanya adalah masyarakat.

3. Transparency (Keterbukaan)

Djarum Foundation sebagai lembaga yang melaksanakan program-program CSR PT Djarum menerapkan prinsip keterbukaan

ini. Semua program CSR yang dilaksanakan oleh Djarum Foundation dapat diakses melalui alamat website yang telah dibuat oleh Djarum Foundation yaitu www.djarumfoundation.com. Tujuannya adalah untuk melakukan publikasi dan memberi informasi terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh Djarum Foundation kepada masyarakat. Masyarakat juga dapat terlibat langsung atau menjadi dalam program-program yang akan dilakukan oleh Djarum Foundation kedepannya karena semua program Djarum Foundation bersifat terbuka untuk semua pihak yang ingin terlibat. Djarum Foundation membuat website juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada PT Djarum yang telah memberikan kepercayaan kepada Djarum Foundation untuk melaksanakan program-program CSRnya.

CSR merupakan suatu bentuk perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga sosial masyarakat. Hal ini menuntut bagaimana perusahaan dalam praktiknya tidak hanya semata-mata mencari keuntungan belaka, tapi lebih dari itu perusahaan juga harus peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Hal inilah yang belum sejalan di Indonesia, dimana masih banyak

perusahaan masih enggan peduli terhadap lingkungan dan juga sosial masyarakat. Banyak perusahaan masih memandang bahwa kegiatan CSR merupakan kegiatan yang banyak membuang uang perusahaan sehingga mengurangi keuntungan mereka. Perusahaan menganggap CSR tidak dapat mendatangkan keuntungan secara nyata dan juga dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memang benar, sebab CSR merupakan sebuah kegiatan untuk jangka panjang dan juga berkelanjutan karena tidak dilaksanakan selama 1 atau 2 tahun tetapi bisa sampai selama perusahaan tersebut ada.

Kesimpulan dan Saran

1. Dalam bentuk kemitraan antara Djarum Foundation dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, terjalin kesepakatan untuk adanya bantuan dari Djarum Foundation berupa kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adapun bentuk bantuan CSR yang dilakukan oleh Djarum Foundation terhadap sejumlah SMK yang sudah ditetapkan Djarum Foundation sebagai penerima bantuan CSR, ialah berupa bantuan sarana dan prasarana

yang biasanya berbentuk alat-alat pendukung kegiatan belajar mengajar atau berbentuk gedung-gedung maupun ruangan pembelajaran. Juga berupa dukungan peningkatan kualitas pembelajaran baik dari aspek tenaga pengajaran berupa pelatihan guru-guru maupun penyesuaian kurikulum pelajaran.

2. Kemitraan kedua lembaga publik dan privat ini menggunakan konsep Kontrak Konsesi disebutkan adanya batasan durasi waktu kerjasama yang berlaku sekitar 20 tahun sampai 35 tahun, setelah itu kewenangan akan kembali kepada lembaga pihak publik untuk mengelola sepenuhnya sesudah kontrak dari pengelolaan pihak swasta berakhir. Namun dalam pelaksanaan kemitraan kedua lembaga ini, sedikit berbeda dari teori yang ada, karena setelah bantuan diberikan Djarum Foundation tetap mengawasi dan memeriksa kondisi bantuan yang diberikan terhadap pengembangan program studi unggulan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Darwan Prints, 2000, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. .H.M.N.

Hardijan Rusli, 2004 "Hukum Ketenagakerjaan 2003", Ghalia Indonesia, Jakarta, Iman Soepomo, 1985 "Pengantar Hukum Perburuhan", Jakarta, Jambatan.

Imam Soepomo, 1992, "Hukum Perburuhan, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan", Djambatan, Jakarta. Lalu Husni, 2000 "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anne, L. T. (2005). Business and Society: Stake Holders, Ethics, Public Policy (International, 11 ed.): Mc Business and Society Review, 112, 315-342.

Rahmat, G. (2009). Corporate Social Responsibility. Retrieved from www.ginooo.wordpress.com

Sulistyaningtyas, I. D. (2006). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Program Kampanye Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 63-76.

Widjaja, G., & Yani, A. (2006). Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, G., & Yeremia, A. P. (2008). Risiko Hukum dan Bisnis

Perusahaan Tanpa CSR. Jakarta: Forum Sahabat.

Bappenas, 2010. "Public Private Partnership Infrastructure Projects in Indonesia 2010- 2014".

Panji Indra, Bastary, 2009. "Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur", TOT PPP, Bappenas-UGM.

Panji Indra, Bastary, 13 Oktober 2009. "Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Proyek KPS di Indonesia", TOT PPP, Bappenas-UGM.

Susanto, AB. 2007. Corporate Social Responsibility : A Strategic Management Approach. Jakarta Consulting Group, Jakarta.

Rahman, R. 2009. Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan. Media Pressindo, Yogyakarta.

Kotler, Phillip and Lee, Nancy. 2005. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause.

John Wiley and Son, Inc. New Jersey.

Prastowo, Joko dan Huda, Miftachul. 2011. Corporate Social Responsibility: Kunci

Meraih Kemulyaan Bisnis. Samudera Biru.
Yogyakarta.

Asnan, F. (2017). Menelusuri
Inovasi Esensi Berbagai Studi Untuk
Inspirasi Inovasi. PT Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta.

Arin Tentrem Mawati, dkk. (2020).
Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan
Strategi. Yayasan Kita Menulis.

Devi, R. (2020). Buku Ajar: Hukum
Ketenagakerjaan. Scopindo Media Pustaka.
Surabaya.

Dirgahayu, Muhammad. (2019).
Dunia Industri: Perspektif Psikologi Tenaga
Kerja. Nas Media Pustaka. Makassar.

Yusid, Riant. (2018). Transformasi
Public Private Partnership. PT Elex Media
Komputindo. Jakarta.

Bambang, I. (2011) Privatisasi
Dalam Model Public Private Partnership.
Atas Kerjasama PPSDM Perhubungan Darat
dengan STIAMI.

Inspirator Muda Nusantara. (2019).
Sustainable Development Goal: Buku
Petunjuk Dasar Mengenai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Graf
Literature. Bandung.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
67 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
13 Tahun 2010.

Sumber peraturan :